

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dalam upaya menciptakan pembangunan nasional dengan cara membagi wilayah atas 34 provinsi, dan provinsi ini dibagi lagi menjadi 410 kabupaten serta 98 kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan di setiap daerah agar pembangunan nasional Indonesia dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia

Pada teori neoklasik dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesis ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesis Neo-klasik. Lebih lanjut pada Hipotesis Neo-klasik dijelaskan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2012).

Pembangunan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh negara sedang berkembang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan yang sering dilakukan oleh negara sedang berkembang adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki berbagai definisi, salah satu definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah pendapat Subandi,(2014) yaitu Suatu proses di mana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah 'garis kemiskinan absolut' tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang

Pembangunan nasional dalam pengoptimalan pembangunan daerah diperkuat dengan adanya undang-undang yang mengatur, yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Adanya undang-undang ini untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi di daerah sebagian besar mengacu pada pertumbuhan ekonomi wilayah di setiap daerah sesuai dengan kekhasan daerah. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada wilayah ini tentu merangsang dan/ atau mengalami perkembangan ekonomi wilayah. Perkembangan ekonomi wilayah yang terjadi diharapkan merupakan perkembangan ekonomi yang baik, dimana Pendapatan Nasional Bruto (GNP) per-kapita riil (harga konstan) harus lebih tinggi dibandingkan (UU Nomor 32 tahun 2004)

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pengembangan wilayah sangat berorientasi pada isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling berkaitan. Dimensi ruang (spasial) mempunyai arti penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang yang terbatas dapat menciptakan konflik namun juga dapat membawa kemajuan bagi individu dan masyarakat. Dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah melakukan usaha pengembangan wilayah diperlukan keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan melihat kondisi tata ruang wilayahnya (Adisasmita, 2010)

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Dapat diartikan bahwa penataan ruang wilayah merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyeraskan dan mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat mendukung kehidupan masyarakat secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan.

Sektor pertanian adalah sektor yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pembangunan di sektor pertanian akan memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Widianingsih, 2015)

Selanjutnya Sugiyanto & Sukei (2010). Salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jika diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena jika semakin maju suatu wilayah maka masyarakat akan memperoleh kehidupan yang layak. Menurut Rustiadi & Dardak, (2008) teori kutub pertumbuhan dapat diartikan dengan konsep pengembangan kawasan agropolitan, mengingat dalam suatu pengembangan kawasan agropolitan terdapat pertumbuhan pusat kegiatan utama yang mendominasi unit-unit ekonomi lain. Sektor pertanian dimasa mendatang masih memegang peran strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena memberikan kontribusi nyata bagi 237 juta penduduk Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang berorientasi pada konsep "*agrobased sustainable development*" perlu terus ditingkatkan karena hal ini diyakini dapat memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia dengan basis pembangunan perdesaan. (Kementerian Pertanian, 2011).

Sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan merupakan salah satu kegiatan perekonomian pada suatu wilayah yang juga berperan serta dalam kegiatan peningkatan ekonomi wilayah. Salah satu tahapan dalam pembangunan suatu wilayah dicirikan oleh pengorganisasian tata ruang kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini diperlukan

kebijaksanaankebijaksanaan yang dapat mengatur keseimbangan perkembangan antar daerah agar kemakmuran yang hendak dicapai dapat lebih ditingkatkan dan didistribusikan secara merata (Jhingan,1996).

Umumnya sektor produksi primer seperti kegiatan sektor pertanian di Negara-negara yang sedang berkembang merupakan sektor yang masih cukup dominan. Secara logis kondisi ini sangat memungkinkan, karena sektor usaha produksi primer seperti pertanian khususnya sub sektor perkebunan tidak terlalu membutuhkan teknologi yang canggih dan mahal. Disamping itu fakta sektor pertanian yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama pada masyarakat yang mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan (Syahrani, 2016)

Kawasan agropolitan merupakan salah satu konsep pengembangan wilayah yang dicetuskan pertama kali oleh Friedmann, (1973). Konsep agropolitan merupakan suatu konsep pengembangan wilayah di pedesaan. Aspek pengkajian pengembangannya merupakan satu kesatuan antara aspek ekonomi pertanian kawasan pedesaan dengan tata ruang, lokasi dan persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam lingkup yang lebih general

Syahrani, (2001). Munculnya ide konsep kawasan agropolitan ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena rendahnya tingkat pertumbuhan pedesaan sebagai akibat dari mengalirnya sumber daya-sumber daya alam, manusia dan modal ke wilayah inti (perkotaan). Pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi

melahirkan inovasi baru lainnya), serta adanya pengaruh produksi yaitu penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan dalam penghasil Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional maupun Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) secara regional bagi Kabupaten Halmahera Utara. Pembangunan pada sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri dan meningkatkan ekspor. Berikut adalaah distribusi Produk Domestic Regional Bruto Halmahera Utaraa atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2015-2019

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara atas dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

NO	JENIS LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,34	24,52	23,42	22,39	23,18
2	Pertambangan dan Penggalian	29,21	28,44	30,67	32,03	29,73
3	Industri Pengolahan	4,09	3,97	3,64	3,41	2,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	5,65	6,00	5,91	6,06	6,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,97	12,26	12,24	12,37	12,56
8	Transportasi dan Pergudangan	2,20	2,28	2,25	2,23	2,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,27	0,28	0,29	0,28
10	Informasi dan Komunikasi	2,60	2,61	2,52	2,50	2,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	1,49	1,44	1,49	1,58
12	Real Estate	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,07	12,82	12,44	12,12	12,67
15	Jasa Pendidikan	2,89	2,93	2,84	2,76	2,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,63	1,58	1,60	1,81
17	Jasa lainnya	0,42	0,43	0,43	0,42	0,44
18	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015-2019

Besarnya lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang di ciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Halmahera Utara di dominasi oleh lima kategori lapangan usaha di antaranya pertambangan dan penggalian; pertanian, perikanan, kehutanan, ; perdagangan besar dan eceran, Reprasi mobil, dan sepeda motor ; Adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib ; dan kontruksi. Hal ini dpat di lihat dari peran masin-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Utara pada tahun 2019 di hasilkan oleh lapangan usaha industry pertambngan dan penggalian yaitu mencapai 29,7 persen. Selanjnutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,18 persen di susul oleh lapangan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 12,56 persen. Berikutnya adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib 12.67 persen dan kontruksi sebesar 6,93 persen. Kontribusi PDRB terbesar menurut lapangan usaha Kabupaten Halmahera Utara adalah industry pertambangan dan penggalian, di bandingkan dengan pertanian. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera tidak di lihat dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian, tetapi kesejahteraan masyarakat Kabupaten di lihat dari lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan, karena masyarakat Kabupaten Halmahera banyak berpenghasilan dari lapangan usaha Kabupaten Halmahera Utara

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sektor pertanian merupakan sektor basis dalam pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Halmahera Utara?
2. Apakah Sektor pertanian menjadi tingkat spesialisasi dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Halmahera Utara?
3. Komoditas-komoditas Pertanian apa saja yang menjadi pengembangan kawasan agropo;itan Kabupaten Halmahera Utara

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah secara spesefik tujuan yang ingin di capai yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sektor pertanian merupakan sektor basis dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupatewn Halmahera Utara
2. Untuk mengetahui sektor pertania yang menjadi tingkat spesialisasi dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Halamahera Utara
3. Untuk mengetahui komoditas-komoditas pertanian apa saja yang menjadi pengembangan kawasan agropolitan Kanupaten Halmahera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian di kabupaten halmahera utara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan

akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti berikut ini:

1. Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian.
2. Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah dengan menciptakan lapangan kerja

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 (Strata-1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya di bidang sektor Pertanian

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat dikaji lebih lanjut